

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia

Ujang Amsyah¹, Sudardi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Putra Pekanbaru

E-mail: ujangamsyahbk192@gmail.com¹, sudardirazqa@gmail.com²

Abstrak

Era desentralisasi di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (literature review) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk menggali secara mendalam pemahaman konseptual dan empiris dari berbagai studi sebelumnya yang relevan, sehingga dapat memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam konteks desentralisasi. Beberapa faktor utama yang ditemukan meliputi kebijakan fiskal dan alokasi anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ekonomi, iklim investasi, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), tata kelola pemerintahan, serta diversifikasi ekonomi. Kebijakan fiskal yang efektif, seperti pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, kualitas SDM yang tinggi serta infrastruktur yang memadai menjadi pendorong utama produktivitas dan investasi. Namun, tantangan seperti kesenjangan antar daerah, korupsi, dan kapasitas institusi yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi potensi lokal, serta penguatan tata kelola yang transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Daerah, Ekonomi, Desentralisasi.

PENDAHULUAN

Era desentralisasi yang dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing. Desentralisasi telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1999, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokal. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah masih belum merata. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi ini perlu dipahami.

Era Desentralisasi merujuk pada periode di mana kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan yang sebelumnya terkonsentrasi di pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Di Indonesia, era desentralisasi dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan utama desentralisasi adalah memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai era desentralisasi di Indonesia:

Karakteristik Era Desentralisasi

- 1) **Otonomi Daerah:** Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal, kecuali untuk beberapa bidang tertentu seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan moneter yang tetap menjadi kewenangan pusat.
- 2) **Perimbangan Keuangan:** Pendanaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam.
- 3) **Pemberdayaan Lokal:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, baik melalui musyawarah maupun pelaksanaan program lokal.
- 4) **Akuntabilitas:** Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat setempat melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan.

Tujuan Era Desentralisasi

1. **Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan:** Desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.
2. **Pemerataan Pembangunan:** Mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal melalui pengelolaan sumber daya yang lebih merata.
3. **Kemandirian Daerah:** Meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan pendapatannya sendiri.
4. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat menjadi lebih responsif.

Dampak Positif Era Desentralisasi

1. **Peningkatan Pendapatan Daerah:** Daerah memiliki kewenangan untuk memaksimalkan potensi lokal, seperti pajak daerah dan retribusi.
2. **Peningkatan Infrastruktur Lokal:** Daerah dapat mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan prioritas setempat.
3. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Melalui program-program pembangunan berbasis komunitas, masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.

Tantangan Era Desentralisasi

1. **Ketimpangan Fiskal:** Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola sumber daya dan pendapatan, sehingga terjadi ketimpangan antarwilayah.
2. **Korupsi dan Tata Kelola:** Desentralisasi memberikan kewenangan besar kepada daerah, yang kadang disalahgunakan oleh pejabat lokal.
3. **Koordinasi Pusat-Daerah:** Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menghambat efektivitas pembangunan.
4. **Ketergantungan pada Transfer Pusat:** Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal belum optimal.

Era desentralisasi merupakan langkah penting dalam reformasi pemerintahan di Indonesia, yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan tata kelola yang baik dan pengelolaan sumber daya yang bijak, desentralisasi dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu indikator keberhasilan desentralisasi adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan memiliki dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi.

Kedua, infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi, menjadi elemen kunci yang mendukung mobilitas barang, jasa, dan informasi yang lebih efisien. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang efektif juga menjadi faktor penting. Kemandirian fiskal, kemampuan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta alokasi anggaran yang tepat sasaran memainkan peran vital dalam mendorong aktivitas ekonomi. Faktor lainnya adalah iklim investasi yang kondusif, yang mencakup regulasi yang mendukung, stabilitas politik, dan keamanan. Keberadaan regulasi yang jelas dan birokrasi yang efisien dapat menarik investasi swasta yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, juga memegang peranan strategis.

Pengembangan sektor-sektor ini dapat memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi tetap signifikan. Ketimpangan antar daerah, korupsi, rendahnya kapasitas administrasi pemerintah daerah, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana berbagai faktor tersebut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih baik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, era desentralisasi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan. Desentralisasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan desentralisasi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut meliputi ketersediaan infrastruktur, tingkat investasi, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah, dan potensi sumber daya alam. Di samping itu, stabilitas politik dan keamanan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif, juga berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam era desentralisasi, variasi tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah semakin mencolok, yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika pembangunan di Indonesia dan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mempersempit kesenjangan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam

meningkatkan kinerja ekonomi serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam era desentralisasi di Indonesia, terdapat berbagai fenomena yang menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu fenomena yang menonjol adalah disparitas ekonomi yang semakin mencolok antara daerah maju dan daerah tertinggal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi masih didominasi oleh daerah-daerah tertentu, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sementara daerah di kawasan timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, cenderung tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, fenomena lain yang mencuat adalah ketergantungan sebagian besar daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan ekonomi sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi daerah masih belum merata dan beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam mengembangkan ekonomi lokal. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi ini perlu dipahami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pengembangan ekonomi daerah yang efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal di banyak daerah masih rendah, sehingga membuat daerah kurang fleksibel dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Fenomena ketidakseimbangan infrastruktur antar wilayah juga menjadi isu penting. Daerah-daerah yang memiliki infrastruktur transportasi, komunikasi, dan energi yang memadai cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang terbatas.

Misalnya, pembangunan infrastruktur besar-besaran di Pulau Jawa telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, namun investasi serupa masih kurang merata di daerah lain. Lebih lanjut, tantangan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, seperti lemahnya kapasitas birokrasi, rendahnya transparansi, dan korupsi, turut menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini mencerminkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat lokal, yang seharusnya menjadi katalis bagi pembangunan daerah. Di sisi lain, potensi ekonomi daerah yang belum tergarap secara optimal menjadi perhatian.

Beberapa daerah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaannya belum mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, daerah penghasil tambang sering kali menghadapi tantangan berupa eksplorasi berlebihan yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Fenomena lainnya adalah pergeseran tren ekonomi global dan nasional, seperti digitalisasi dan ekonomi hijau (green economy), yang memberikan peluang baru sekaligus tantangan bagi daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi mereka. Beberapa daerah yang adaptif terhadap perubahan ini, seperti pengembangan ekonomi berbasis teknologi di Bali dan Yogyakarta, menunjukkan hasil yang menjanjikan, sementara daerah lain masih berjuang untuk mengikuti arus perubahan.

Fenomena-fenomena tersebut membuat penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi menjadi sangat menarik dan relevan. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika ekonomi daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (literature review) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk menggali secara mendalam pemahaman konseptual dan empiris dari berbagai studi sebelumnya yang relevan, sehingga dapat memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan hasil kajian literatur terdahulu. Studi ini juga berupaya untuk memberikan sintesis dari berbagai temuan yang telah ada guna memahami dinamika pertumbuhan ekonomi daerah secara komprehensif dalam konteks desentralisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, termasuk: Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Laporan penelitian terkait desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dokumen kebijakan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan dari lembaga resmi (misalnya BPS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri). Buku akademik dan publikasi yang membahas teori dan praktik desentralisasi, ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Pencarian Literatur: Peneliti menggunakan database seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan ProQuest untuk mencari artikel yang relevan dengan topik penelitian menggunakan kata kunci seperti pertumbuhan ekonomi daerah, desentralisasi di Indonesia, faktor-faktor ekonomi regional, dan tata kelola daerah. Seleksi Literatur: Literatur yang diperoleh disaring berdasarkan relevansi, kualitas sumber, dan kontribusinya terhadap topik yang diteliti. Hanya literatur yang memenuhi kriteria inklusi yang dianalisis lebih lanjut.

Pengelompokan Informasi: Literatur yang terpilih dikelompokkan berdasarkan tema, seperti faktor infrastruktur, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, investasi, dan potensi sumber daya alam. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah dan pusat dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, era desentralisasi yang dimulai sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai potensi lokal. Desentralisasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia

Ujang Amsyah, Sudardi

Namun, capaian pertumbuhan ekonomi daerah masih bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait.

- 1) Infrastruktur yang Mendukung Aktivitas: Ekonomi Infrastruktur memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi, dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam membangun infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis sering menjadi hambatan, terutama di daerah tertinggal.
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik. Dalam era desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menjadi semakin strategis. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala.
- 3) Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah: Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki akses terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal di banyak daerah masih rendah. Selain itu, penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi juga menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 4) Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Banyak daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, minyak, gas, dan hasil hutan. Namun, pengelolaan yang kurang bijaksana sering kali mengarah pada eksplorasi berlebihan, kerusakan lingkungan, dan rendahnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 5) Iklim Investasi dan Regulasi: Iklim investasi yang kondusif dapat menarik investor untuk menanamkan modal di suatu daerah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa daerah masih menghadapi masalah regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya insentif bagi investor. Dalam desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim bisnis yang ramah menjadi semakin penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- 6) Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan: Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pemerintahan yang stabil dan transparan cenderung lebih menarik bagi investor dan mampu menjalankan program pembangunan secara efektif. Sebaliknya, daerah yang sering menghadapi konflik politik atau ketidakstabilan sosial cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- 7) Adaptasi terhadap Tren Ekonomi Global: Dalam era globalisasi, tren seperti digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau memberikan peluang baru bagi daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi mereka. Beberapa daerah yang mampu beradaptasi

dengan tren ini, seperti Bali dengan pariwisata digital dan Yogyakarta dengan startup teknologi, menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Namun, banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi inovasi ini.

Faktor-faktor seperti infrastruktur, kualitas SDM, pengelolaan keuangan, potensi sumber daya alam, iklim investasi, stabilitas politik, dan adaptasi terhadap tren global sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia. Meskipun desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Dengan pendekatan yang tepat, desentralisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah adalah peningkatan kapasitas suatu wilayah atau daerah dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang diukur melalui indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah, beberapa poin penting yang dapat dijelaskan adalah: Fokus Wilayah: Pertumbuhan ekonomi daerah berpusat pada aktivitas ekonomi yang terjadi dalam wilayah administratif tertentu, seperti provinsi, kota, atau kabupaten, sesuai dengan potensi dan karakteristik lokalnya. Indikator Utama: Indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah laju pertumbuhan PDRB, baik secara nominal maupun riil. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah sering menghadapi tantangan seperti ketimpangan antarwilayah, ketergantungan pada sumber daya alam, dan kurangnya infrastruktur serta tata kelola yang efektif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah bukan hanya tentang peningkatan angka statistik, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Desentralisasi telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1999, yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokal. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah masih belum merata. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi ini perlu dipahami.

Faktor Ekonomi

- 1) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto): PDRB merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi.
- 2) Investasi: Investasi langsung dan tidak langsung berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 3) Inflasi: Inflasi yang terkendali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Faktor Politik

- 1) Kualitas Pemerintahan: Kualitas pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.
- 2) Kebijakan Daerah: Kebijakan daerah yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting.

Faktor Sosial

- 1) Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kesehatan: Kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas.
- 3) Kualitas Hidup: Kualitas hidup yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Faktor Infrastruktur

- 1) Transportasi: Infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas.
- 2) Komunikasi: Infrastruktur komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi.
- 3) Energi: Ketersediaan energi yang memadai sangat penting.

Faktor Lingkungan

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Kualitas Lingkungan: Kualitas lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup.
- 3) Bencana Alam: Pengelolaan bencana alam yang efektif sangat penting.

Pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Pemerintah daerah harus memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap literatur yang relevan, hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Temuan-temuan berikut menjelaskan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan:

- 1) Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

Pembangunan infrastruktur yang memadai terbukti menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dengan akses jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi yang baik menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Namun, hasil studi menunjukkan ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menyebabkan disparitas ekonomi yang signifikan, di mana daerah yang memiliki infrastruktur lengkap lebih mudah menarik investasi dan mengembangkan aktivitas ekonomi.

- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM berperan besar dalam menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akses terhadap pelatihan keterampilan memiliki kemampuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah tertinggal, yang menghambat pengembangan potensi SDM secara merata.

- 3) Kemandirian dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah masih menghadapi kendala, seperti lemahnya perencanaan dan pengawasan, serta adanya penyalahgunaan anggaran dalam beberapa kasus.

4) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam

Banyak daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaannya sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi yang tidak berkelanjutan dan kurangnya hilirisasi produk sumber daya alam menjadi penyebab utama rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pembangunan daerah. Beberapa daerah yang berhasil mengelola sumber daya alam secara bijak menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

5) Iklim Investasi dan Kebijakan Daerah

Iklim investasi di suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintah daerah, regulasi yang mendukung, dan penyederhanaan birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan kebijakan yang pro-investasi, seperti pemberian insentif pajak dan penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung, berhasil menarik lebih banyak investasi dibandingkan daerah yang memiliki regulasi yang tidak jelas dan birokrasi yang berbelit.

6) Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Daerah yang memiliki stabilitas politik dan pemerintahan yang transparan lebih mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa konflik politik, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah daerah menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah.

7) Adaptasi terhadap Tren Global

Daerah yang mampu beradaptasi dengan tren ekonomi global, seperti digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau, menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Contoh keberhasilan dapat dilihat di beberapa daerah yang mengembangkan ekosistem digital dan pariwisata berbasis teknologi. Namun, sebagian besar daerah masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi perubahan ini akibat keterbatasan teknologi dan sumber daya.

8) Penyelarasan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah yang berhasil menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional, seperti pembangunan infrastruktur strategis dan pengembangan kawasan industri, menunjukkan hasil yang lebih optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Ketimpangan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, dan lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan global juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguanan tata kelola, serta investasi pada infrastruktur dan SDM untuk mengatasi kendala yang ada dan mengoptimalkan potensi daerah.

Desentralisasi di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 2001, bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola sumber daya dan kewenangan secara mandiri. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Artikel ini akan

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia

Ujang Amsyah, Sudardi

membahas faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia.

- 1) Kapasitas Fiskal Daerah: Kapasitas fiskal merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai program pembangunan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering kali kesulitan membiayai kebutuhan dasar, sehingga pertumbuhan ekonominya tertinggal.
- 2) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci dalam mengelola desentralisasi. Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi lebih mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, praktik korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat.
- 3) Sumber Daya Alam dan Manusia: Potensi sumber daya alam (SDA) sering kali menjadi salah satu faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang kaya akan SDA, seperti tambang, pertanian, atau kehutanan, memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang bijaksana, ketergantungan pada SDA dapat menyebabkan kerentanan ekonomi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting. Daerah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi memiliki daya saing lebih besar dalam era globalisasi.
- 4) Infrastruktur dan Aksesibilitas: Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi. Daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya terbatas cenderung mengalami kesulitan untuk mengembangkan perekonomian.
- 5) Kebijakan dan Regulasi Lokal: Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berpengaruh langsung terhadap iklim usaha dan investasi. Kebijakan yang mendukung, seperti pemberian insentif kepada investor dan penyederhanaan perizinan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu kompleks atau memberatkan dapat menghambat aktivitas ekonomi.
- 6) Kerjasama Antar Daerah: Kerjasama antar daerah, seperti melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus atau proyek lintas wilayah, dapat meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Kerjasama ini memungkinkan daerah untuk berbagi sumber daya, meningkatkan daya saing, dan mengatasi keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh masing-masing daerah.
- 7) Dukungan Pemerintah Pusat: Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, dukungan dari pemerintah pusat tetap penting, terutama dalam bentuk transfer dana, pengawasan, dan bimbingan teknis. Kebijakan makroekonomi dan regulasi nasional juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
- 8) Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun keterlibatan langsung dalam proyek-proyek lokal, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang aktif juga meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan program pembangunan.

Era desentralisasi memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Namun, keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan SDA dan SDM, infrastruktur, kebijakan lokal, kerjasama antar daerah, dukungan pemerintah pusat, dan partisipasi masyarakat. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor ini, diharapkan setiap daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan nasional secara keseluruhan.

Infrastruktur merupakan elemen fundamental dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke, infrastruktur yang terintegrasi menjadi kebutuhan mutlak untuk menciptakan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik yang memfasilitasi mobilitas manusia dan barang, tetapi juga sebagai katalisator dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Pemerintah daerah harus memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi barang dan jasa secara efisien, menekan biaya logistik, dan mempercepat waktu pengiriman. Misalnya, pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan waktu tempuh antarwilayah dan meningkatkan konektivitas antarprovinsi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan jaringan listrik, memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Daerah yang memiliki akses listrik yang baik dapat menarik investasi sektor industri dan manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Konektivitas antarwilayah memungkinkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi minim akses pasar, untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional dan global. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan laut di Indonesia Timur, seperti Pelabuhan Makassar New Port, telah memperkuat akses ekspor komoditas lokal ke pasar internasional. Konektivitas udara melalui bandara juga menjadi penopang sektor pariwisata di daerah seperti Bali, Lombok, dan Labuan Bajo, yang kini menjadi destinasi wisata unggulan dunia.

Namun, meskipun terdapat berbagai kemajuan, masih ada ketimpangan konektivitas antarwilayah. Wilayah Indonesia Barat, seperti Jawa dan Sumatera, cenderung lebih maju dalam hal infrastruktur dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Ketimpangan ini menciptakan disparitas ekonomi yang signifikan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Pengembangan infrastruktur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, faktor geografis, seperti topografi yang sulit dan wilayah yang terpencil, sering kali meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur.

Korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam proyek infrastruktur juga menjadi kendala serius yang menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek besar mengalami keterlambatan atau tidak selesai tepat waktu akibat manajemen yang buruk. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat perencanaan dan pengawasan dalam proyek infrastruktur. Kerja sama dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, penerapan teknologi modern, seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan proyek, dapat meningkatkan efisiensi

dalam pengembangan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada wilayah maju, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Program seperti "Tol Laut" dan pengembangan jalan lintas Papua menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dan konektivitas antarwilayah merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi disparitas, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan infrastruktur yang terintegrasi, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dapat menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Namun, keberhasilan ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam era desentralisasi di Indonesia, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi secara mandiri, namun keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa aspek kunci. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah mempengaruhi produktivitas ekonomi. Daerah yang berhasil meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik, dan telekomunikasi adalah fondasi penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi. Daerah yang memiliki infrastruktur memadai lebih mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan. Kebijakan daerah yang mendukung investasi, termasuk kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan keamanan, sangat menentukan daya tarik ekonomi suatu wilayah. Pemanfaatan SDA secara optimal, berkelanjutan, dan berbasis teknologi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan. Daerah yang mampu mendiversifikasi basis ekonominya, tidak hanya bergantung pada sektor tertentu, lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global maupun nasional. Secara keseluruhan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, optimalisasi potensi lokal, serta kerja sama dengan pemerintah pusat. Tantangan seperti korupsi, kesenjangan antar daerah, dan rendahnya kapasitas institusi perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalin, L. (2016). Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pedapan dan desentralisasi di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53-68.
- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(2), 71-79.
- Ayu, D., Daulay, M., & Gowasa, R. K. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia: sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi. *Polyscopia*, 1(2), 36-42.
- Azzumar, M. R., & Handayani, H. R. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Christia, A. M., & Ispriyarno, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Dyanti, F. E. (2021). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601-608.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784-799.
- Indrasari, V., & Poerwono, D. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Jordi, B., & Wiguna, A. B. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kalimantan Timur Pada Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2014-2020. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(2), 200-209.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119.
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 7(2), 218209.
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 75-88.
- Nasution, H. S. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produk domestik regional bruto era desentralisasi fiskal di Propinsi Banten periode 2001: 1-2009: 4. *Media Ekonomi*, 29-48.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2606-2614.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1), 70-91.

- Nurhemi, N. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 18(2), 183-206.
- Prabasari, R. I., & Purnomo, D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4291-4308.
- Prasetyo, M. A. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1326-1331.
- Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S. (2019). Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 13-25.
- Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2019, December). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan di Daerah Pertanian Tinggi dan Rendah Pada Era Desentralisasi Fiskal. In *Prosiding: Seminar Nasional Ekonomi dan Teknologi* (pp. 64-75).
- Raharja, W. T., Khusna, K., Dhesinta, W. S., Nomor, J. A. R. H., & Sukolilo, K. (2020). Dampak Desentralisasi dalam Otonomi Daerah pada Pengembangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 6(1).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten/kota jawa tengah tahun 2008-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1).
- Rudibdo, R., & Sasana, H. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Ekskresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 215-226.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta kaitannya dengan otonomi daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3).
- Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2).
- Sasana, H. (2016). Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di provinsi di Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 30(1).
- Sovita, Y. D. R. I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 2(4).
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193-210.
- Windusanco, B. A. (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 89-105.
- Zulkipli, Z. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 3(1).